



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

TAHUN 2025



 Ppid Bapperida-btg
 ppidbapperidabontang
 bapperida.bontangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya laporan pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang Tahun 2025. Pedoman pelaksanaan FKP telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka membangun pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur maka pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada pengguna layanan. Untuk itu dilaksanakan Forum Konsultasi Publik agar menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan dari pengguna layanan, serta meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP Bapperida Tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih. Demikian Laporan Penyelenggaraan FKP ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas layanan di Bapperida Kota Bontang.

Plt. Kepala Bapperida



Sony Suwito Adihcahyono, SH., MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 197004191998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Dasar Pelaksanaan	3
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	4
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2.2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik	4
2.3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	5
2.4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik.....	5
BAB III HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	6
3.1. Identifikasi Masalah	6
3.2. Analisis	6
3.3. Rencana Aksi	7
BAB IV PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Serta peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan publik. Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pelayanan informasi data, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang sebagai unit penyelenggara pelayanan publik juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan yang mudah serta cepat kepada pengguna layanan.

Forum Konsultasi Publik ini difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan. Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada. Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan/dan atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

B. Manfaat

1. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
2. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
3. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada pengguna layanan;
4. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
5. Menyelaraskan antara harapan pengguna layanan dengan kemampuan penyelenggara layanan;
6. Pengguna layanan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
7. Meningkatkan peran serta pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang adalah terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, yang mencakup sebagai berikut :

1. Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
2. Informasi Geospasial
3. Konsultasi Pengelolaan Informasi Geospasial

1.4. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Pelaksanaan

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Juli 2025

Jam : 08.00 Wita – selesai

b. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara *daring* melalui aplikasi *zoom meeting* di Ruang Rapat Pangripta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

2.2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik

a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

b. Peserta Forum Konsultasi Publik

Peserta yang hadir meliputi 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bontang sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Inspektur Kota Bontang
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
14. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
16. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
21. Plt. Kepala Dinas Perhubungan
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian
24. Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26. Direktur RSUD Taman Husada
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
28. Kepala Dinas Kesehatan
29. Camat Bontang Utara
30. Camat Bontang Barat
31. Camat Bontang Selatan

2.3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Metode Forum Konsultasi Publik (FKP) dilakukan *daring* melalui *zoom meeting*.

2.4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

1. Pembukaan oleh *Master of Ceremony* (MC)
2. Doa
3. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Plt. Kepala Bapperida
4. Pengenalan Moderator
5. Paparan Materi oleh Sekretaris Bapperida
6. Diskusi, saran dan masukan dari peserta forum
7. Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

3.1. Identifikasi Masalah

Kegiatan secara *daring* dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bontang. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan secara *daring*, diperoleh saran, masukan serta tanggapan yang disampaikan oleh pengguna layanan. Adapun saran, masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh publik antara lain :

- a. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam peningkatan pelayanan publik Bapperida sesuai KemenpanRB untuk memperbaiki SP4N LAPOR, yang merupakan salah satu kanal pengaduan yang diakui adalah SP4N LAPOR, sehingga perlu adanya admin pendukung di setiap perangkat daerah.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan data spasial di perangkat daerah masih belum optimal.
- c. Sumber Daya Manusia Aparatur yang menangani perencanaan perangkat daerah belum merata.
- d. Masih terdapat kendala dalam penyelarasan kinerja daerah dengan kinerja perangkat daerah.

3.2. Analisis

Adapun analisis dari identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Ini adalah sistem satu pintu yang dikelola pemerintah untuk menampung berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan, saran atau pertanyaan terkait pelayanan publik kepada pemerintah. Beberapa fitur penting dalam SP4N LAPOR antara lain : Anonim (Identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum), Rahasia (Isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik, dan Tracking ID (Nomor unik untuk melacak status tindak lanjut laporan.

- b. Data Spasial adalah data yang berhubungan dengan lokasi atau ruang geografis. Data ini mencakup informasi tentang posisi suatu objek di permukaan bumi, bentuk objek tersebut, dan hubungan antar objek. Data Spasial juga bisa disebut sebagai data geospasial. Secara lebih rinci, data spasial meliputi Koordinat Geografis, Geometri Objek serta Atribut. Data Spasial digunakan dalam berbagai bidang seperti, Sistem Informasi Geografis (SIG), Navigasi, Pemantauan Lingkungan, Perencanaan Wilayah, Pertanian.
- c. Pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani perencanaan perangkat daerah terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah. SDM yang berkualitas dalam perencanaan akan mampu mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan solusi yang tepat dan mengelola pelaksanaan program pembangunan daerah secara optimal.
- d. Penyelarasan kinerja daerah dengan kinerja perangkat daerah adalah proses penyusunan dan penyesuaian indikator kinerja, baik di tingkat daerah (umum) maupun di tingkat perangkat daerah (khusus), agar saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Proses ini memastikan bahwa setiap perangkat daerah berkontribusi pada kinerja keseluruhan daerah dan sebaliknya, kinerja daerah menjadi acuan bagi perangkat daerah.

3.3. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan pengaduan Bapperida saat ini memang masih menggunakan nomor pengaduan kantor Bapperida, sebab terkait layanan SP4N LAPOR kurang terdengar sehingga lebih banyak yang menggunakan media sosial. Kedepannya untuk pemantauan reformasi birokrasi maka kami akan menambahkan SP4N LAPOR pada kanal website Bapperida.

- b. Bapperida selaku unsur yang melakukan perencanaan diamanahkan untuk menjadi penyelenggara perencanaan geospasial perangkat daerah melalui Peraturan Walikota Bontang tentang Satu Data Indonesia. Klinik geospasial merupakan konsultasi gratis dan bantuan teknis untuk penyusunan peta yang berbasis online dan berbentuk *story maps*, maka data - data dapat dikaitkan dengan koordinat dan berbasis Lokasi. Saat ini telah terdapat beberapa *dashboard* perangkat daerah yang telah dibuat dan masuk dalam website PETA KITA. PETA KITA telah cukup banyak yang mengakses, berdasarkan data per bulan sekitar 1000 views yang berkunjung ke website PETA KITA, harapan kedepannya layanan yang kami berikan semakin mudah untuk diakses dan digunakan. Guna memaksimalkan pelayanan geospasial, saat ini terdapat 5 (lima) orang sumber daya manusia di Bapperida, yang dapat memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah terkait PETA KITA.

- c. Pelayanan konsultasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan, dalam hal ini adalah untuk penyusunan renstra dan renja dan dokumen lainnya terkait perencanaan, termasuk proses bagaimana cara menyusun cascading dan menurunkan dokumen dari tingkat kota ke perangkat daerah, serta pohon kinerja dan sebagainya. Berkaitan hal tersebut diperlukan konsultasi guna, menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan kota dan perangkat daerah. Selain pelayanan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan, Bapperida juga memberikan konsultasi pelayanan evaluasi dokumen perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat mencapai target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

BAB IV PENUTUP

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan standar pelayanan publik. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik secara *daring* yang dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bontang maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti hasil dari Forum Konsultasi Publik
- 2) Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat sebagai pedoman peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan
- 4) Pada dasarnya Pelayanan Publik Bapperida telah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya manusia kedepannya guna peningkatan kinerja pelayanan Bapperida

Bontang, 31 Juli 2025

Plt. Kepala Bapperida



Sony Suwito Adihcahyono, SH.,MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 197004191998031005

LAMPIRAN

❖ NOTULA



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Gedung Graha Taman Praja Blok IV, Lantai I, Jalan Moch Roem, Bontang Selatan,
Bontang, Kalimantan Timur 75325
Laman bapeliitbang.bontangkota.go.id,
Pos-el bapperida@bontangkota.go.id, bapperida.bontang@gmail.com

NOTULA

Rapat	: Forum Konsultasi Pelayanan Publik atas layanan BAPPERIDA
Surat	: Nomor: 000.8.3.2/1273/BAPPERIDA/2025
Hari/Tanggal	: Kamis, 31 Juli 2025
Waktu Rapat	: 08.00 sd 09.30 WITA
Pimpinan Rapat	
Ketua	: Sony Suwito Adihcahyono , SH.MM
Moderator	: M. Taupan Kurnia S, S.Si
Pencatat	: Ida Naimah, S.IP
Acara	: 1. Pembukaan Oleh MC 2. Do'a Bersama 3. Pembukaan oleh Pit. Kepala BAPPERIDA 4. Penyampaian Materi oleh Sekretaris BAPPERIDA 5. Diskusi Bersama 6. Diskusi dan Saran 7. Penutup
Peserta	: (Terlampir)

Dihasilkan pembahasan sebagai berikut :

Sony Suwito Adihcahyono , SH.MM / Pit. Kepala BAPPERIDA

- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan Badan yang memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah sebagai penerima layanan.
- Kegiatan hari ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan kritik dari Perangkat Daerah, guna perbaikan kinerja pelayanan BAPPERIDA khususnya terkait layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Informasi Geospasial dan Konsultasi Pengelolaan Informasi Geospasial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M. Taupan Kurnia S, S.Si / Sekretaris BAPPERIDA selaku Moderator

- Terdapat tiga layanan yang akan disosialisasikan dalam Forum Konsultasi Publik yakni: Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Informasi Geospasial dan Konsultasi Pengelolaan Informasi Geospasial.

Noni Agetha, ST / Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan

- BAPPERIDA selaku unsur yang melakukan perencanaan diamanahkan untuk menjadi penyelenggara perencanaan geospasial perangkat daerah melalui Peraturan Walikota Bontang tentang Satu Data Indonesia. Klinik geospasial merupakan konsultasi gratis dan bantuan teknis untuk penyusunan peta yang berbasis online dan berbentuk *story maps*, maka data - data dapat dikaitkan dengan koordinat dan berbasis Lokasi. Sehingga lebih terlihat dan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pemetaan dan persebarasan berbasis geospasial. Saat ini, telah terdapat beberapa *dashboard* perangkat daerah yang telah dibuat dan masuk dalam website PETA KITA. Perangkat Daerah yang telah memiliki *dashboard* salah satunya adalah DP3AKB dan DINKES. PETA KITA telah cukup banyak yang mengakses, berdasarkan data per bulan sekitar 1000 views yang berkunjung ke website PETA KITA, harapan kedepannya layanan yang kami berikan semakin mudah untuk diakses dan digunakan. Guna memaksimalkan pelayanan geospasial, saat ini terdapat 5 (lima) orang sumber daya manusia di BAPPERIDA, yang dapat memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah terkait PETA KITA.

Diny Prathiwi, S.STP / Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Pelayanan konsultasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan, dalam hal ini adalah untuk penyusunan renstra dan renja dan dokumen lainnya terkait perencanaan, termasuk proses bagaimana cara menyusun cascading dan menurunkan dokumen dari tingkat kota ke perangkat daerah, serta pohon kinerja dan sebagainya. Berkaitan hal tersebut diperlukan konsultasi guna, menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan kota dan perangkat daerah. Selain pelayanan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan, BAPPERIDA juga memberikan konsultasi pelayanan evaluasi dokumen perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat mencapai target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Klinik data merupakan proses pengolahan data pada setiap Perangkat Daerah. Sebagai upaya untuk menyusun Satu Data Kota Bontang, guna pengelolaan data sektoral.

Diskusi :

Andi Hasanuddin / Sekretaris Diskominfo

- Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan layanan publik BAPPERIDA sesuai Kemendagri adalah untuk memperbaiki SP4N Lapar, yang merupakan satu satu kanal pengaduan yang akui adalah SP4N Lapar, sehingga perlu ada admin pendukung di setiap perangkat daerah. Harapannya BAPPERIDA dapat memanfaatkan aplikasi SP4N Lapar, untuk pemantauan reformasi birokrasi sehingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

layanan ini lebih dapat berkembang. Sebab, pelayanan masyarakat lebih banyak melakukan pengaduan ke media sosial.

M. Taupan Kurnia S, S.Si / Sekretaris BAPPERIDA

- Pelayanan pengaduan BAPPERIDA saat ini memang masih menggunakan nomor pengaduan kantor BAPPERIDA, sebab terkait layanan SP4N Lapor kurang terdengar sehingga lebih banyak yang menggunakan media sosial. Dan kedepannya kami akan menambahkan SP4N Lapor pada kanal website BAPPERIDA.

Ir. Muhammad Natsir / Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP

- Pelayanan BAPPERIDA sudah sangat luar biasa, dan kedepannya Satpol PP akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh BAPPERIDA untuk melakukan Forum Konsultasi Publik. Satpol PP juga merasakan manfaat dari pelayanan geospasial BAPPERIDA yakni terkait Aplikasi SIP Satpol PP yang luar biasa bermanfaat, SDM yang ada juga memberikan pelayanan dengan sangat baik.

Kesimpulan :

- Pada dasarnya Pelayanan Publik BAPPERIDA telah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya manusia kedepannya guna peningkatan kinerja pelayanan BAPPERIDA.

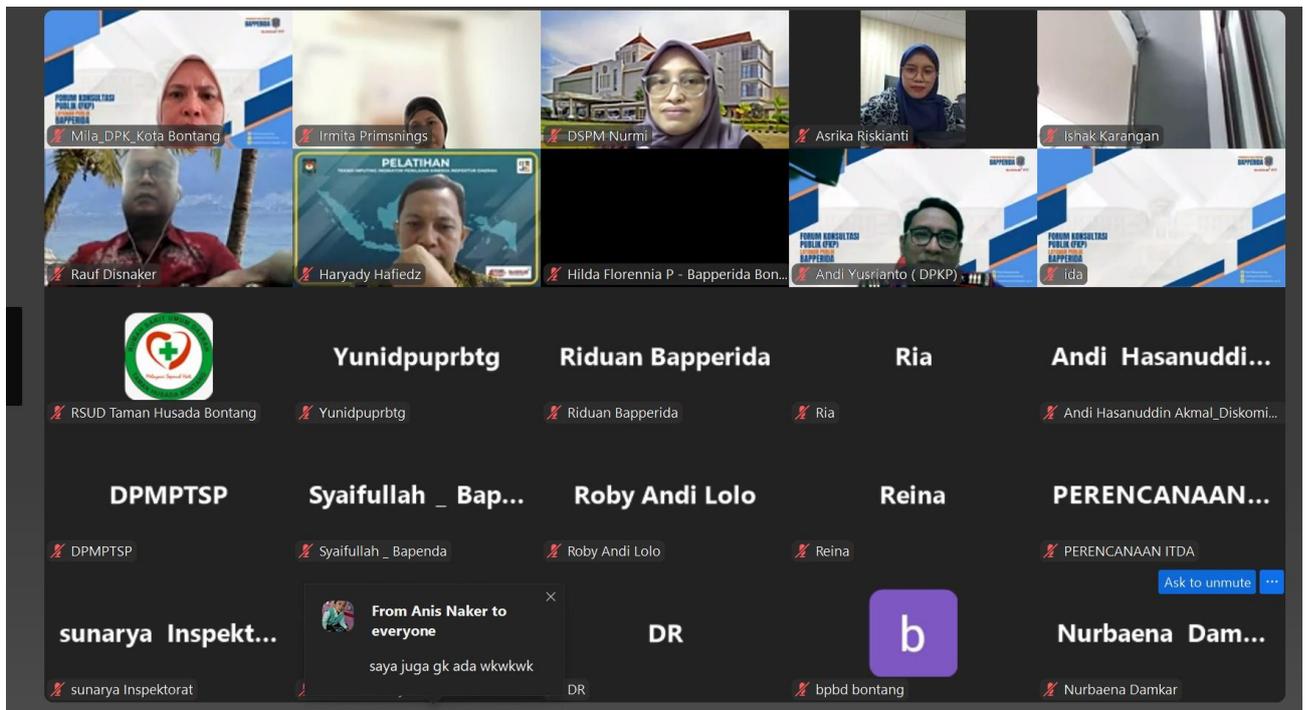
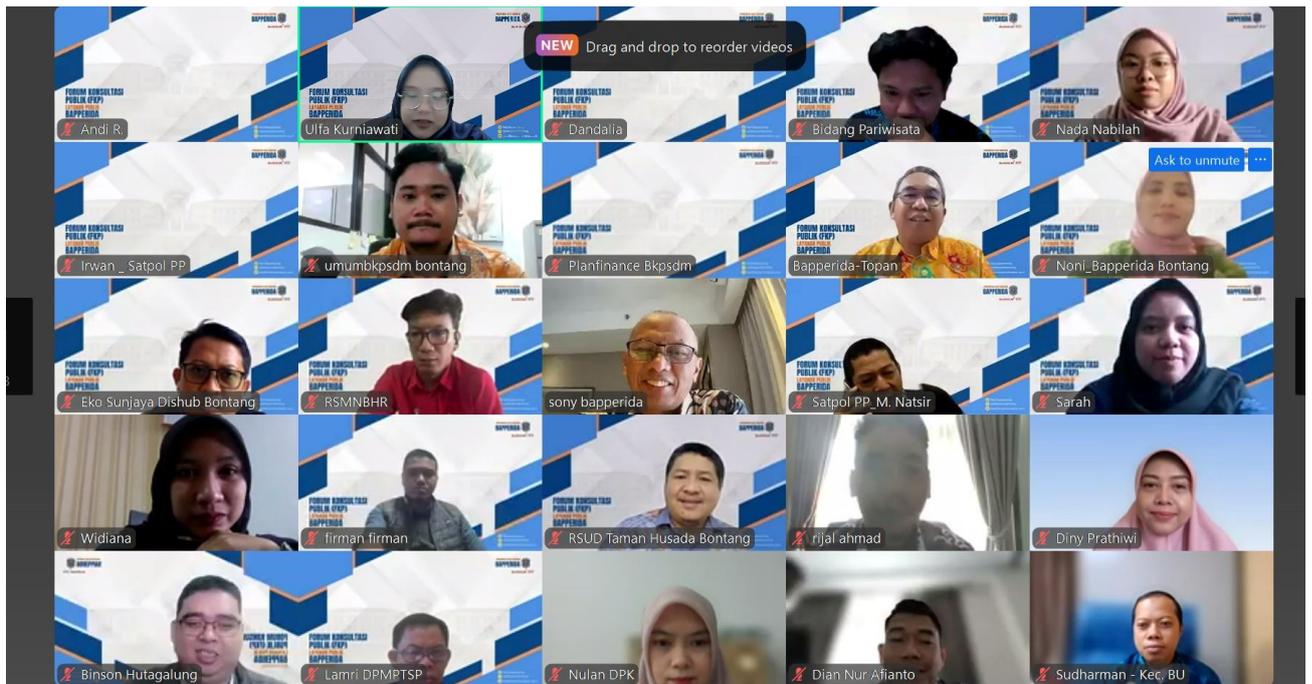
Plt. Kepala BAPPERIDA,

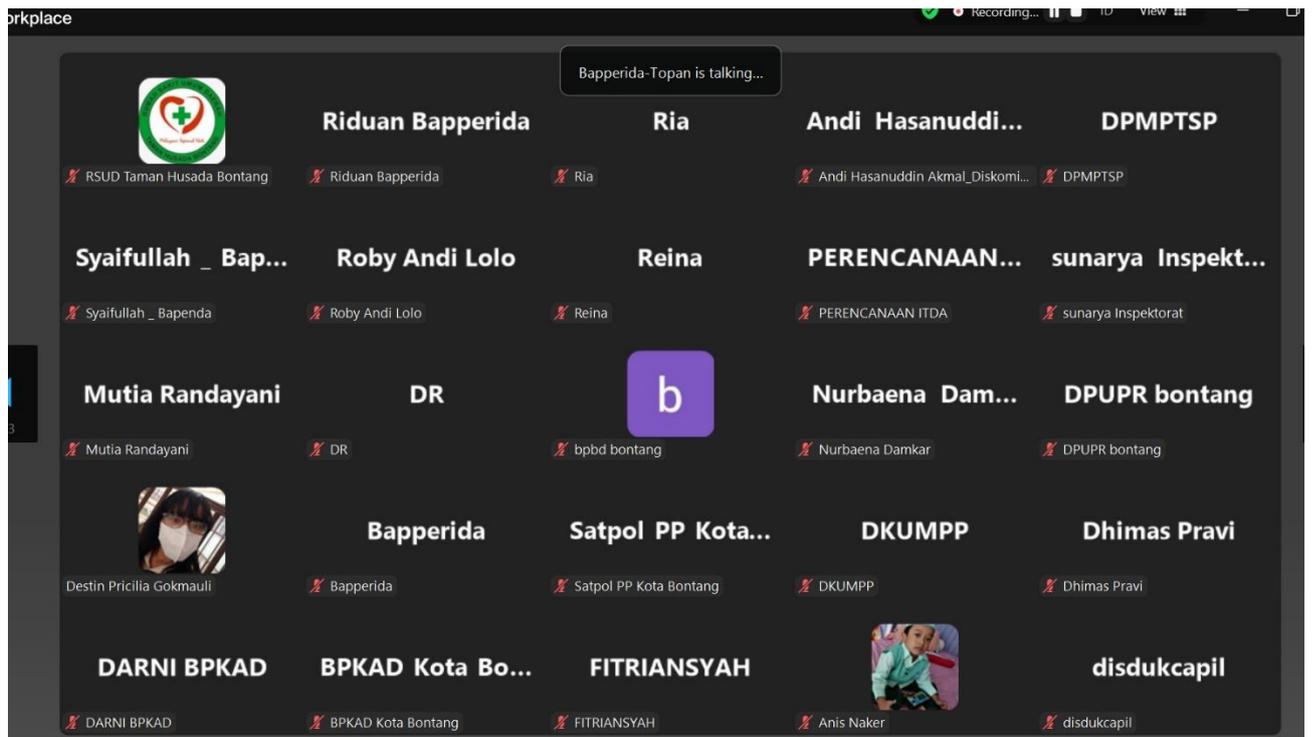


Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197004191998031005

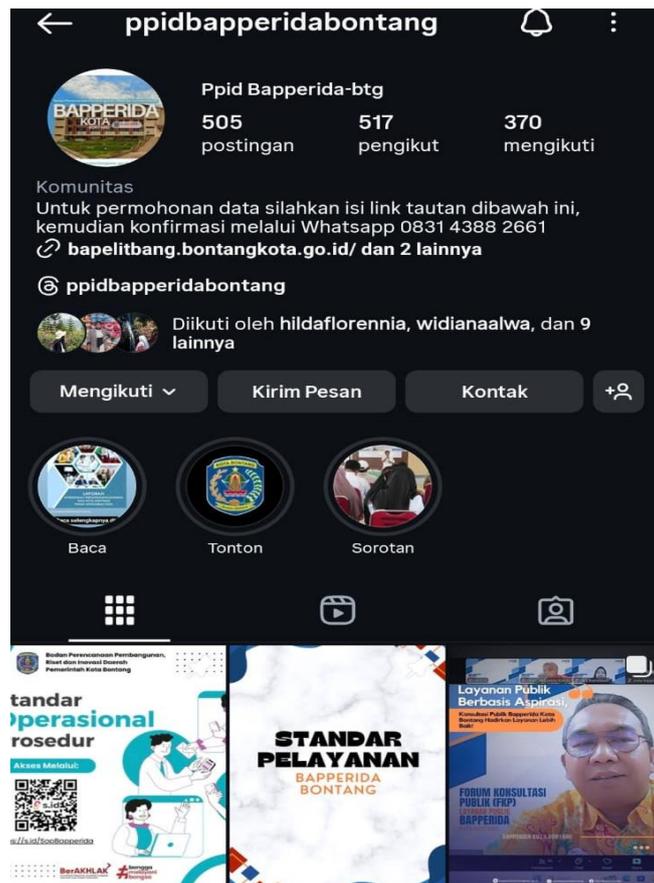
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

❖ DOKUMENTASI





❖ PUBLIKASI BAPPERIDA PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL



❖ UNDANGAN



PEMERINTAH KOTA BONTANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Moch Roem Nomor 1, Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur 75325
Telepon (0548) 3030303 Faksimile (0548) 3030313
Laman setda.bontangkota.go.id

Bontang, 30 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.2/1273/BAPPERIDA/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yth. Terlampir
di
Bontang

Sehubungan dengan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang dan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ini disampaikan, agar Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menugaskan Sekretaris / Kasubbag Perencanaan dan Keuangan / Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk hadir berpartisipasi pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu : 08.00 Wita – selesai
Tempat : Zoom Meeting (<https://us06web.zoom.us/j/89135897918?pwd=q0kyoD2ah3b63eq5ukv8jVjohaNUQ.1>)
Meeting ID : 891 3589 7918
Kode Sandi : 615310
Kedudukan perangkat daerah masing-masing
Acara : Forum konsultasi publik atas layanan publik yang diselenggarakan oleh BAPPERIDA:
1. Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
2. Informasi Geospasial
3. Konsultasi Pengelolaan Informasi Geospasial

Demikian surat ini disampaikan agar menjadi perhatian, dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bontang, 30 Juli 2025

Sekretaris Daerah,



Aji Erlynawati

Lampiran I

Nomor : 000.8.3.2/1273/BAPPERIDA/2025

Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Undangan ditujukan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Inspektur Kota Bontang
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
14. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
16. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
21. Plt. Kepala Dinas Perhubungan
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian
24. Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26. Direktur RSUD Taman Husada
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
28. Kepala Dinas Kesehatan
29. Camat Bontang Utara
30. Camat Bontang Barat
31. Camat Bontang Selatan

Bontang, 30 Juli 2025

Sekretaris Daerah,



Aji Erlynawati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

❖ DAFTAR HADIR

7/31/25, 11:42 AM

Zoho Forms

Signup Report

Form: DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK BAPPERIDA

NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	TANDA TANG
Asrika Riskianti	Penata Layanan Operasional	BAPPERIDA	PEREMPUAN	
Roby Andi Lolo	Sekretaris	Kec. Bontang Barat	LAKI-LAKI	
Romy Rizka, S.ST	Kabag Keuangan	RSUD Taman Husada Bontang	LAKI-LAKI	
Emawati	Pengadministrasi Perkantoran	BPKAD Kota Bontang	PEREMPUAN	
NULANDARI	PENELAAH TEKNIK KEBLIJAKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PEREMPUAN	
Dhimas Pravi Ghossan Soesanto	JF Analis Pemanfaatan Iptek	Bapperida	LAKI-LAKI	
Bedarita, SE	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PEREMPUAN	
Abdul Rauf Hafid	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Dinas Ketenagakerjaan	LAKI-LAKI	
Maryady	Kasubag Umum & Kepegawalan	Inspektorat	LAKI-LAKI	
Firman	Perencana	Bapperida	LAKI-LAKI	
Dhestwu Vincy Rana	Arsiparis Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	LAKI-LAKI	
Irwan Febrayana, S.Sos	PII, Kasubag Umum Kepegawalan	Satpol PP	LAKI-LAKI	
FAHRIAN JUVRISNADANI FADHAN	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	LAKI-LAKI	
M. Taupan Kurnia, S	Sekretaris	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	LAKI-LAKI	
Darmin	Penelaah Teknis Kebijakan	BPSD	LAKI-LAKI	
Nurbaena	Sekretaris	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	PEREMPUAN	
Ir. Muhammad Natsir	Kabid Tranlibum dan Linmas	Satpol PP Kota Bontang	LAKI-LAKI	
Hilda Florenia Pratiwi, SE	Fungsional Perencana Ahli Pertama	BAPPERIDA	PEREMPUAN	
Riduanayah	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	LAKI-LAKI	
M. Syaifulah	Sekretaris	Bapenda	LAKI-LAKI	

NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	TANDA TANG
NURFITRIANA, S.Ak	PENELAIAH TEKNIK KEBIJAKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG	PEREMPUAN	
Rusmin Bahar	Operator Layanan Operasional	Bapperida	LAKI-LAKI	
r. Patmiasih, SE, M.Si	JF Perencana Ahli Muda	RSUD Taman Husada Bontang	PEREMPUAN	
Bid. Periklata	Staf	Dispopar Bontang	LAKI-LAKI	
A. Rahmahuliah	Pranata Komputer	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	LAKI-LAKI	
Andi Yusrianto, SE, M.A.P	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	DPKP	LAKI-LAKI	
Reina Luvita Riyanto	penelaah teknis kebijakan	bapperida	PEREMPUAN	
Noor Afifah Merdaningtyas	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bontang	PEREMPUAN	
Maryama Shofa	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	BKPSDM Kota Bontang	PEREMPUAN	
MUHAMMAD RIZKY ALI DERMAWAN	PENELAIAH TEKNIK KEBIJAKAN	BKPSDM	LAKI-LAKI	
Restu Guriting Panggali	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang	PEREMPUAN	
Johan Nindya P, SE., M.Acc	Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	LAKI-LAKI	
LAMRI	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	DPMPTSP	LAKI-LAKI	
Binson Hutagalung	Perencana Ahli Muda	Bapperida	LAKI-LAKI	
EKO SUNJAYA	ANALIS TATA USAHA	DINAS PERHUBUNGAN	LAKI-LAKI	
Lenny Kuswinda Juwita	Pranata Humas	DP3akb	PEREMPUAN	
Andy Nurni	Prakom	DSPM	PEREMPUAN	
Drs. Sunarya, M.Pd	Sekretaris	Inspektorat Daerah	LAKI-LAKI	
Dandalia Cahyaning Ratri, S.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	PEREMPUAN	
Jabarlah	Perencana Ahli Muda	Bapperida	PEREMPUAN	
Nada Nabillah Luthiyah	Perencana Ahli Pertama	BAPPERIDA	PEREMPUAN	

NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	TANDA TANG
Pratiwi Mutia Randayani	JF - Perencana Ahli Pertama	Bapperida	PEREMPUAN	
Ida Nalmah	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	PEREMPUAN	
Sarah Junita	Penelaah Teknis Kebijakan	BAPPERIDA	PEREMPUAN	
Widat	Staf	Kecamatan Bontang Baru	PEREMPUAN	
widlana	staf umum	bapperida	PEREMPUAN	
Ulfa Kurniawati	Prakom	Bapperida	PEREMPUAN	